SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: MENCERDASKAN ATAU MENINDAS?

Umar Mansyur

Universitas Muslim Indonesia

umar.mansyur@umi.ac.id

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiannya. Potensi kemanusiaan tersebut merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Sesuai dengan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Di Indonesia, pemerintahlah yang berkewajiban untuk merealisasikannya (seperti dalam UUD 1945). Namun benarkah sistem pendidikan nasional itu untuk mencerdaskan anak bangsa, atau hanyalah tindak praktik pendidikan penindasan dan dehumanisasi. Apakah ini berarti bahwa sebuah bentuk inkonsistensi dari pemerintah?

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimana pun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan, itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup setiap masyarakat. Landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofis normatif. Bersifat filosofis karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia.

Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti: Apakah pendidikan itu? Mengapa pendidikan itu diperlukan? Apa yang seharusnya menjadi tujuan? Dan sebagainya.

Filsafat pendidikan terdiri atas: (1) *Filsafat perenialisme*. Perenialisme berasal dari kata perenial yang berarti kekal atau abadi. Filsafat ini beraliran pro-kemapanan dan anti perubahan, bahkan cenderung mempertahankan sistem yang telah ada. Filsafat ini biasanya didasarkan pada teori-teori klasik yang dipengaruhi oleh dogma-dogma dan kajian agama. (2) *Filsafat esensialisme*. Esensialisme adalah filsafat pendidikan yang beraliran humanis. Akan tetapi filsafat ini juga mempertahankan kemapanan. 3) *Filsafat eksistensialisme*. Eksistensialisme lahir pasca perang dunia kedua, yang merupakan sintesis terhadap keserakahan manusia dalam memperlakukan manusia lain. Perang dunia diakibatkan oleh keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam dan manusia

sehingga manusia kehilangan eksistensi. (4) *Filsafat progresifisme*. Filsafat ini berhaluan progresif atau masa depan dan anti kemapanan. Penganutnya beranggapan bahwa segala sesuatu dalam dunia manusia adalah selalu berubah. Maka pendidikan harus mampu untuk melakukan perubahan demi terciptanya kehidupan yang seimbang. (5) *Filsafat rekonstruksionisme*. Filsafat ini berasal dari kata rekonstruksi yang berarti perubahan terus-menerus. Filsafat ini hampir sama dengan progresifisme.

Paradigma Pendidikan Indonesia

Paradigma pendidikan di Indonesia adalah paradigma liberal dan beraliran filsafat perenialisme dan esensialisme. Racikan keduanya menisbahkan adanya keterpisahan antara manusia dan dunia sehingga beraliran anti perubahan dan kemapanan. Peserta didik ditempatkan sebagai objek yang paksa untuk menerima puluhan bahkan ratusan teori yang tidak relevan sama sekali dengan kebutuhan akan realitas. Hal ini disebut dengan *Banking Concept of Education*. Konsep pendidikan bank, adalah teori yang menempatkan peserta didik sebagai objek yang harus menerima berbagai macam teori yang justru tidak relevan dengan dengan realitas. Realisasinya justru mengakibatkan proses pengalienasian manusia. Di dalam kelas misalnya, peserta didik ibarat sebuah tabungan yang diisi dengan berbagai macam teori/konsep dan pendidik adalah penabung. Pendidikan hanyalah sebagai objek yang mencatat, menghafal, dan menerima konsep yang diberikan penabung/pendidik. Manusia tidak hidup bersama dengan dunia.

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya telah menjadi momentum untuk memperingatkan segenap negeri akan pentingnya arti pendidikan bagi anak negeri yang sangat kaya ini. Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Akan tetapi, kewajiban pemerintah untuk merealisasikannya hingga saat ini masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Mereka hanya sibuk mengurus urusan-urusan lain sementara kebutuhan akan pendidikan anak-anak negeri sendiri diabaikan dan tidak dihiraukan. Masih terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikan. Selain itu, layanan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu pun masih hanya didalam angan sementara diberbagai daerah, pendidikan masih berada dalam kondisi keprihatinan.

Mulai dari kekurangan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan hingga sukarnya masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena permasalahan ekonomi dan kebutuhan hidup.

Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini sangat membuat peserta didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Pembunuhan kreatifitas ini disebabkan pula karena paradigma pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri. Pendidikan juga saat ini telah menjadi sebuah industri dan cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Bukan lagi sebagai upaya pembangkitan kesadaran kritis. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek jual-beli gelar, jual-beli ijazah hingga jual-beli nilai. Belum lagi diakibatkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebutuhan tempat belajar, telah menjadikan tumbuhnya bisnis-bisnis pendidikan yang mau tidak mau semakin membuat rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk. Pendidikan hanyalah bagi mereka yang memiliki ekonomi yang kuat, sedangkan bagi kalangan orang miskin pendidikan hanyalah sebuah mimpi. Ironinya, ketika ada inisiatif untuk membangun wadah-wadah pendidikan alternatif, sebagian besar dipandang sebagai upaya membangun pemberontakan. Ini adalah salah satu bentuk penindasan. Ini berarti inkonsistensi pemerintah. Terus bagaimana dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2?

Konsep Pendidikan Kritis

Dalam dunia pendidikan, nama Paulo Freire barangkali sudah tidak asing lagi. Paulo Freire bagi banyak praktisi pendidikan adalah tokoh pendidikan yang penuh misteri. Konsep pendidikan Paulo Freire disebut dengan konsep *konsientisasi* (aksi-refleksi). Pendidikan menurut Freire adalah sebuah usaha untuk memanusiakan manusia dengan pelibatan manusia dalam mengenal realitas yang terjadi disekelilingnya. Dalam pola dialektika, *aksi* adalah proses kerja manusia dalam menganalisis dan memperbaharui realitas, dan *refleksi* adalah mereview aksinya dalam rangka mencari ketepatan konsep dalam mencapai keseimbangan hidup antara manusia dan realitas dimana manusia hidup dan mencari teori baru.

Pendidikan kritis adalah pendidikan yang berdasarkan kesadaran akan keberadaan manusia sebagai bagian dari realitas. Kesadaran ini terbangun dalam kerangka keterlibatan manusia dan dunianya. Proses perubahan dan anti kemapanan hanya dapat tercipta dalam proses pendidikan proggresif.

Dalam pendidikan pembebasan, konsientisasi terimplementasi jika konsep, sistem, dan kurikulum pendidikan memberikan ruang dan pemahaman kepada pembelajar dalam menciptakan konsepnya sendiri sebagai bagian dari dunia. Dalam mengatasi persoalan dan hambatan hidup, manusia adalah subjek aktif yang berdialog dengan diri dan lingkungannya secara langsung. Pendidik dan peserta didik adalah subjek sedangkan realitas adalah objek yang disadari dimana hubungan subjek-objek ini tercipta dalam suasana dialogis (*pedagogic system*).

Omong kosong untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan kreatif jika peserta didiknya dianggap sebagai objek, bodoh, dan kertas kosong ditambah dengan pemisahan pendidikan dengan realitas. Konsep subjek-objek menghasilkan pendidikan yang otoriter dan formalisme. Akibatnya output pendidikan hanya diperuntukkan untuk memapankan sistem pesanan penguasa. Sikap kritis diberangus sehingga menghasilkan manusia yang berkesadaran magis, naif, dan alergi terhadap perubahan. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dalam jangka waktu lama, serjana dicetak menjadi pekerja yang siap untuk dipasangkan pada sistem. Dalam sistem inilah kapitalisme yang eksploitatif mendapatkan ruang untuk mengeruk sumber daya alam (SDA) Indonesia dan menjadikan warganya sebagai pekerja semata, menjadi buruh di negeri sendiri. Kesadaran manusia harus dibangkitkan dengan menempatkan mereka sebagai subjek yang berada bersama dengan dunianya untuk melawan eksploitasi kapitalisme asing.

Hari Pendidikan Nasional bulan ini di tengah-tengah pertarungan politik Indonesia sudah selayaknya menjadi sebuah tonggak bagi bangkitnya bangsa Indonesia dari keterpurukan serta lepasnya Indonesia dari “penjajahan” bangsa asing. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan sebuah kesejahteraan yang sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)